

REFLEKSI EMPIRIK PERILAKU POLITIK PEMIMPIN ISLAM DAN POSISI UMAT ISLAM INDONESIA

Oleh: Imam Mujiono

LATAR BELAKANG MASALAH

Mayoritas bangsa Indonesia (sekitar 90%) memeluk agama Islam. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara Islam, dan dasar negaranya pun bukan syari'at Islam (Al-Qur'an dan Hadist), melainkan Pancasila. Para pemimpin Islam terbagi dua, ada yang menghendaki negara Islam, dan tidak harus negara Islam, karena yang penting tegaknya keadilan, terciptanya masyarakat egalitarian yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi suatu golongan atas golongan lainnya, dan adanya jaminan kebebasan pengamalan syariah Islamiyah.

Tujuan penulisan topik ini adalah melihat secara kritis realitas politik Islam di Indonesia yang tercermin pada perilaku pemimpin Islam dan posisi umat Islam Indonesia dari masa ke masa.

Ada tiga alasan penting mengapa penelusuran ini perlu dilakukan:

Pertama, mayoritas rakyat Indonesia memeluk agama Islam, tetapi posisi politik umat Islam senantiasa fluktuatif dan cenderung lemah. Partai-partai politik Islam lebih sering merupakan kelompok politik minoritas dalam lembaga kenegaraan yang berakibat hanya dapat melakukan peran yang relatif kecil dalam memberi corak keislaman pada perkembangan politik Indonesia, sehingga peran politik sentral lebih banyak diwarnai oleh kaum nasionalis sekuler. Sebagai konsekuensi logis dari posisi politik yang lemah, partai-partai Islam sering dihadapkan pada posisi sulit karena tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri dengan sistem dan tata politik yang diciptakan "bersama". Pendekatan akomodatif ini dipandang sebagai hasil "ijtihad" maksimal, padahal terkadang hanya bersumber dari kesalahan manajerial beberapa pimpinan kelompok Islam yang tidak mampu membendung egoisme kelompoknya sehingga enggan melakukan upaya sinergis dengan kelompok Islam lainnya.

Kedua, penelusuran ini dapat dijadikan sebagai *guiding* bagi generasi muda Islam yang saat ini sedang gandrung politik, untuk tidak terjebak dua kali pada lubang yang sama.

Ketiga, tulisan ini bermaksud menggambarkan "geliat" umat Islam Indonesia dari masa ke masa melalui telaah atas perilaku politik pemimpin Islam yang tercermin pada posisi umat Islam untuk membumikan syari'ah Islam di Indonesia secara sistematis.

ISLAM: POLITIK DAN NEGARA

Sepanjang sejarah umat Islam, politik tidak pernah lepas dari bidang garap pemikiran umat sejak jaman Rasulullah SAW sampai periode Khulafurrasyidin, bahkan pada masa dinasti Islam, umat Islam lebih tercermin sebagai masyarakat politik (Fachry Ali, 1985).

John L. Esposito (1985) berpendapat Islam mempunyai keterkaitan yang integral dan mendasar dengan politik, bahkan masyarakat Islam memberikan pikiran-pikiran dasar yang bersifat normatif tentang politik, lebih dari itu secara historis juga tampil menjadi kekuatan politik.

Esposito (1987) memberikan catatan penting bagaimana kehidupan politik umat Islam terus berlanjut sampai masa pasca kerasulan Muhammad SAW. Sejak abad ke-7 sampai ke-20, Islam telah menduduki tempat yang penting dalam negara dan tingkah laku politik umat Islam.

Kenneth Cragg dalam Arkoun (1998) menyatakan dalam konteks politik, problem pertama yang muncul dalam Islam adalah soal kaitan dasar agama dan politik.

Kaum tradisional muslim berpendapat bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan politik, karena Islam sebagai agama membutuhkan negara tersendiri. Pandangan yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang bersifat pribadi dianggap bertentangan secara diametral dengan pandangan kaum tradisional. Contoh yang relevan dengan pandangan kaum tradisional adalah pendirian negara Pakistan yang secara tidak langsung menjaga kepentingan material kaum muslimin dari mayoritas Hindu di India. Oleh karena itu, Al-Maududi, seorang ulama besar Pakistan pada masa itu menentang pendirian negara tersebut.

Persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu subyek penting, yang diperdebatkan oleh para pemikir Islam sejak seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas. Diskusi tentang hal ini bahkan belakangan makin hangat, tatkala antusiasme untuk tidak menyebut "kebangkitan Islam" melanda hampir seluruh dunia Islam.

Pengalaman masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia, terutama usai Perang Dunia II mengesankan adanya hubungan yang canggung antara Islam (*din*) dan negara (*daulah*), atau bahkan politik pada umumnya. Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim dan eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam.

Tingkat penetrasi "Islam" ke dalam negara dan politik berbeda-beda, sebagaimana persoalan negara mana yang dapat disebut sebagai negara yang betul-betul menjadi prototipe (pola dasar) dari "negara Islam". Dalam hal ini Azyumardi Azra (1996) pernah mempertanyakan apakah Arab Saudi, Iran atau Pakistan dapat disebut sebagai representasi negara Islam sesungguhnya?

Untuk kasus Indonesia, problematika yang muncul terletak pada paradigma negara, karena negara Indonesia tidak berada dalam kevakuman ideologis dan hegemonitas agama dalam mempertahankan pluralitas dan kemapanan ideologi. Negara mereduksi segala simbol-simbol formal agama yang dianggap mengandung potensi latent, yang berupa kecenderungan konflik dari berbagai macam kecenderungan agama atau struktur ideologi negara itu sendiri.

Resiko struktural yang tidak dapat dihindari adalah munculnya kendala bagi upaya aktualitas politik Islam, sebagai akibat operasionalisasi Islam dalam konteks politik dalam dua paradigma yang tarik-menarik. Paradigma itu adalah keagamaan Islam di satu pihak dan negara yang mempunyai logika dan sistem tersendiri (Tobroni dan Syamsul, 1994).

Terlepas bagaimana akhirnya, baik dalam konteks ideologi dan umat Islam sendiri melahirkan perbedaan dan konflik, yang kemudian melahirkan visi politik berbeda. Umat Islam sejauh menyangkut nilai kepentingan politik berada dalam biduk pemikiran yang sama. Umat memandang bahwa politik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pembumian nilai-nilai keislaman. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Ahmad Syafii Maarif (1988), politik merupakan keperluan agama yang penting, sebab tanpa topangan agama, politik tidak akan tegak secara kokoh.

Islam datang ke Indonesia adalah Islam yang mampu beradaptasi dengan penguasa-penguasa lokal sehingga menjadi pemeluk Islam, yang taat bukan sekedar untuk legitimasi politik belaka. Terlepas dari kualitas Islam yang disampaikan kepada masyarakat, dapat dinyatakan bahwa proses Islamisasi yang relatif cepat di Nusantara tidak dapat dipisahkan

dari bantuan dan perlindungan penguasa-penguasa lokal, sehingga Islam dipeluk oleh hampir 90% dari rakyat Indonesia, suatu jumlah pengikut yang menduduki peringkat pertama di dunia Islam (Syafii Maarif, 1993).

Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, maka sebagian pemimpin Islam menyatakan bahwa negara (kekuasaan politik) umat

diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan kolektif.

Teori tentang hubungan Islam dan kekuasaan seperti dikemukakan oleh para tokoh Islam Indonesia sebenarnya tidak banyak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah pada periode klasik. Dalam *al-Siyasah al-Syar'iah*, Ibnu Taimiyah menulis : "Wilayah (organisasi politik) bagi (kehidupan politik) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting, sebab politik dapat memperkokoh agama (Ibnu Taimiyah, 1966). Negara bagi Ibnu Taimiyah, antara lain berfungsi sebagai institusi politik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencegah larangan-laranganNya. Selanjutnya dikatakan : "Dan karena Allah subhanahu wataala mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya".

Abdul Karim Zaidan (1970) menyimpulkan pendapat Ibnu Taimiyah tersebut dengan menyatakan bahwa orang Islam wajib menegakkan suatu *Daulah Islamiyah* untuk melaksanakan hukum-hukum syariah, sedangkan Muhammad Natsir dalam Isa Ansori (1951) menyatakan bahwa negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak bagi Al-Qur'an, sebab dengan aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

Fazlurrahman (1982) menekankan masalah kekuasaan, bahkan dilukiskan : "Al-Qur'an berbicara tentang puasa hanya dalam beberapa ayat saja, tetapi hampir sepertiga ayat dalam Al-Qur'an membangun mesin kekuasaan yang efektif untuk melindungi kepentingan dan daerah kekuasaan muslim"

Amien Rais (1982) menyatakan bahwa *Islamic State* atau negara Islam tidak pernah disebut secara eksplisit, baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Oleh karena itu berarti tidak ada perintah dalam sistem Islam untuk menegakkan negara Islam selama suatu negara itu menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan, menciptakan suatu masyarakat egalitarian, jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan lain, dipandang sebagai negara yang baik. Apalah artinya suatu negara menggunakan sistem Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya formalitas kosong.

MASA PRA KEMERDEKAAN

Selama masa penjajahan Belanda, kondisi umat Islam sangat menyedihkan (Taufik Abdullah, 1987). Baru pada masa pendudukan Jepang, meskipun singkat merupakan episode pembukaan kembali keterlibatan umat Islam dalam kancah politik (H.J. Benda, 1980).

Sumbangan terbesar Jepang bagi politik Islam di Indonesia terletak pada upaya menyatukan berbagai kekuatan Islam dalam satu organisasi Masyumi yang didirikan pada 7 Agustus 1945, didukung oleh Muhammadiyah maupun Nahdhatul

Ulama. Pada mulanya pembentukan Masyumi bertujuan menggiring kekuatan Islam agar mau membantu Jepang dalam perang Asia Raya (Al-Chaidar, 1998). Saat-saat akhir pendudukan, Jepang beralih orientasi dengan memberikan perhatian lebih banyak kepada kelompok nasionalis sekuler. Meskipun tetap memberikan perlindungan kepada kelompok Islam, namun lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang kendali politik nasional setelah Indonesia merdeka.

Kenyataan ini terlihat dari wakil-wakil Islam yang duduk dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1944-1945. Dalam komite inilah terjadi perdebatan ideologis yang serius antara wakil-wakil golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam menetapkan dasar ideologi negara. Pihak Islam mengusulkan gagasan negara Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Pihak nasionalis sekuler menolak gagasan tersebut dan mengajukan gagasan negara integralis dengan dasar ideologi Pancasila.

Sebagaimana diutarakan oleh salah seorang wakil kelompok Islam yang duduk di BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo, pihak Islam berargumentasi bahwa mayoritas penduduk negara Indonesia memeluk agama Islam, maka diperlukan institusi formal seperti negara agar syariat Islam dapat berjalan, sebab tanpa institusi formal maka syariat Islam tidak dapat berjalan dengan baik, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Pernyataan Ki Bagus di atas sepenuhnya dapat dipahami oleh pihak nasionalis sekuler, namun kelompok ini masih tidak dapat menerima gagasan negara Islam, karena menurut Soepomo, salah seorang wakil kelompok nasionalis sekuler, meragukan apakah syariat Islam akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Ideologi Islam dalam pandangan kaum nasionalis sekuler adalah bentuk sistem kuno yang tidak mampu menjawab persoalan-persoalan modern sebuah masyarakat. Padahal cukup banyak referensi tentang konsep negara modern Islam yang dihasilkan intelektual muslim. Upaya untuk memahami Islam tidak sepadan dengan upaya kaum nasionalis Islam untuk mau mengerti ideologi-ideologi lain (Al-Chaedar, 1998). Perbedaan tersebut berlangsung terus, maka untuk tidak menimbulkan perpecahan dilakukan kompromi dan dicapai kesepakatan bersama sebagaimana terumuskan dalam Piagam Jakarta (Endang Saifudin Anshari, 1960), yang menyepakati Pancasila merupakan dasar negara. Sila pertama dirumuskan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu adalah puncak dari perjuangan konstitusional umat Islam. Piagam ini merupakan kompromi politik ideologis antara kaum elite kelompok Islam dan nasionalis yang ditanda-tangani oleh sembilan pemimpin Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno (Ahmad Syafii Maarif, 1993).

MASA REVOLUSI FISIK (1945-1949)

Sejak kemerdekaan yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, kaum nasionalis sekuler memegang tampuk kekuasaan negara dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan modern yang sekuler. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 dibicarakan kembali, dengan alasan demi persatuan nasional, tujuh kata yang sangat berarti bagi umat Islam itu dihapus. Dengan demikian, Piagam Jakarta hanya berumur 57 hari, karena hanya sampai tanggal 12 Agustus 1945. Ketujuh kata tersebut diganti dengan formula : Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai simbol tauhid dalam sistem iman umat Islam. Dengan perubahan ini sebenarnya pihak Islam tidaklah terlalu dikalahkan, sebab atribut Yang Maha Esa dalam UUD 1945 juga menjwai seluruh Pembukaan dan Batang Tubuh konstitusi kita (Ahmad Syafii Maarif, 1993).

Penghapusan ketujuh kata tersebut menurut Al-Chaedar (1998) dipandang sebagai kekalahan politik Islam. Kendatipun demikian, para pendukung gagasan negara Islam tidak menyerah begitu saja. Hal ini tercermin dengan Gerakan Darul Islam (1949-1964) yang memproklamkan berdirinya negara Islam Indonesia (NII) di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dan adanya perjuangan wakil-wakil Islam di dalam sidang Konstituante hasil Pemilu 1955 berusaha menggolkan kembali gagasan negara Islam.

Selama hampir lima tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi, disusul kekalahan Jepang dari tentara Sekutu, Belanda berusaha menduduki kembali kepulauan Nusantara. Pada masa tersebut, para elit menghentikan perdebatan ideologi, tetapi mengerahkan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mencegah Belanda berkuasa kembali di wilayah Republik Indonesia.

Kedua kelompok ini mampu mengembangkan hubungan politik yang relatif harmonis. Perjuangan fisik kaum muslimin terlihat melalui gerakan lasykar-lasykar Hizbullah, Sabilillah dan lasykar-lasykar lokal lainnya. Kelompok nasionalis tetap memegang kemudi kepemimpinan.

Menyusul diteruskannya kekuasaan Belanda kepada Republik Indonesia bulan Desember 1949, kelompok Islam perlahan-lahan mulai memperlihatkan kekuatan yang besar dalam diskursus politik nasional.

Pembentukan partai Masyumi di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 1945, melalui sebuah kongres umat Islam, tampaknya harus dipandang sebagai jawaban atas keperluan umat Islam untuk mempunyai suatu institusi politik yang mampu memperjuangkan aspirasi politik mereka di panggung nasional. Kongres umat Islam sekaligus menghasilkan kesepakatan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya institusi politik umat Islam. Karenanya wadah lain seperti MIAI buatan Jepang, tidak

lagi diakui sebagai institusi mereka. Pembentukan Masyumi ini didukung oleh seluruh umat Islam, baik dari kubu tradisional maupun modernis (Al-Chaedar, 1998).

Dengan Masyumi sebagai wakil politik satu-satunya, kelompok Islam berhasil menarik jumlah pengikut yang besar, karena merupakan gabungan dari kalangan muslim modernis seperti Muhammadiyah dengan jumlah anggota yang besar di perkotaan dan kalangan tradisional seperti NU dengan jumlah anggota yang lebih besar dan banyak berada di wilayah pedesaan.

Sepanjang menyangkut gagasan terbentuknya negara Islam (Islam sebagai dasar negara dan ideologi negara), umat Islam telah berjuang bahu-membahu meninggalkan perbedaan-perbedaan paham keagamaan, terutama antara kalangan tradisional dan modernis. Namun dalam perkembangannya, persatuan umat yang dibangun dalam wadah Masyumi mulai mengalami friksi internal, akibat faksionalisme tradisional-modernis yang dikaitkan dengan jumlah jatah kedudukan dan peran politik para kader masing-masing faksi, sehingga mempercepat munculnya perpecahan, diawali oleh PSII pada tahun 1947 dan NU pada tahun 1952.

Faksionalisme tradisional-modernis, pada gilirannya membentuk watak keagamaan dan perilaku politik tertentu pada masing-masing pihak. Secara sederhana, kalangan tradisional karena latar belakang pendidikannya terkadang dianggap sebagai kelompok yang buta politik dalam arti luas, tetapi dipandang mampu berpikir tentang persoalan keagamaan murni. Sementara kalangan modernis karena pada umumnya memiliki elite yang berlatar belakang pendidikan modern, dianggap sebagai kalangan yang memiliki sedikit pengetahuan keislaman, namun mempunyai kemampuan lebih untuk berbicara tentang persoalan-persoalan politik kenegaraan.

Benih-benih perpecahan sesungguhnya merupakan implikasi alokasi peran yang telah dirancang sebelumnya, misalnya kalangan tradisional menduduki kubu Majelis Syuro, yang seringkali hanya bergelut dengan persoalan-persoalan keagamaan murni, sehingga kurang mendapatkan peran politiknya, sementara kalangan modernis menduduki kubu pengurus eksekutif, yang sehari-hari menjalankan roda kepemimpinan Masyumi (Al-Chaedar, 1998).

MASA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (1950-1959)

Dekade ini dikenal sebagai periode Demokrasi Konstitusional karena Indonesia berada di bawah UUDS 1950. Meskipun kenyataannya negara telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, UUDS 1950 masih dianggap sementara, karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas utama majelis Konstituante adalah menyusun rancangan konstitusi yang permanen, akhirnya dalam kerangka legal konstitusional para anggota Majelis Konstituante terlibat perdebatan ideologis

politis yang sengit dan panas. Akan tetapi, Majelis Konstituante akhirnya berhasil menyelesaikan 90% tugasnya termasuk membuat berbagai ketetapan seputar masalah unsur-unsur substantif konstitusi seperti hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebijakan negara, dan bentuk pemerintahan.

Dalam diskursus ini kelompok Islam pada intinya menyatakan kembali aspirasi ideologi politik yang sudah dikemukakan pada masa pra kemerdekaan, yakni mendirikan negara berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasar argumen-argumen mengenai watak holistik Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain, serta kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin Ahmad, Isa Anshari dan KH. Masykoer, secara kukuh mempertahankan watak Islam yang holistik, karena percaya bahwa Islam mengatur setiap aspek kehidupan. Negara pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang meliputi seluruh masyarakat dan lembaga, yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan aturan-aturan yang mengikat, berdasarkan prinsip-prinsip ilahiyah.

Pancasila sebagai ideologi negara, mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang heterogin secara keagamaan, beberapa tokoh kelompok nasionalis memandang Pancasila sebagai suatu kesepakatan bersama, baik bagi para politisi PNI maupun aktivis Kristen seperti Arnold Monutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok-kelompok agama yang berbeda. Jika Islam harus dijadikan dasar negara, dikhawatirkan tidak ada tempat bagi kelompok non muslim di Nusantara. Bagaimanapun hal itu mengandung citra diskriminasi konstitusional. Menghadapi persoalan ini, para politisi Islam menghadapi kesulitan menjawab tuduhan ini.

Diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara serta dihapuskannya "tujuh kata" dari Piagam Jakarta dapat ditafsirkan sebagai "kekalahan" politik Islam, kendatipun demikian para pendukung gagasan negara Islam tersebut, untuk sebagian besar tidak menyerah begitu saja. Gerakan Darul Islam (1949-1964) yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan perjuangan wakil-wakil Islam di dalam sidang Konstituante hasil Pemilu 1955 seperti dikemukakan di depan untuk menggolkan kembali gagasan negara Islam, merupakan indikasi konsistensi perjuangan mereka (B.J. Bolland, 1985).

Proklamasi Negara Islam Indonesia yang dilakukan oleh Kartosoewirjo yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1949 di desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan tanggapan terhadap kecenderungan republik ke arah sekuler, maka diwujudkan cita-cita teologi negara Islam, yang dikenal dengan nama Darul Islam yang berpusat di Jawa Barat.

Perbedaan yang paling mendasar antara Masyumi dengan Darul Islam yaitu bahwa Masyumi menyetujui rumusan Pancasila sekaligus berbicara tentang suatu "masyarakat yang Islami", tetapi tidak berbicara tentang negara Islam sebagaimana Darul Islam.

Perkembangan gerakan Islam pasca Darul Islam hingga masa Orde Baru terpecah menjadi dua arus aktivisme sosial yaitu tradisional dan modernis, yang tradisional diwakili oleh NU dan Perti sementara modernis diwakili Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain.

Aktivisme dan idealisme politik tidak lagi berani mengemuka setelah kegagalan politik ini. Islam terus menjadi sasaran kecurigaan negara, seberapa pun positifnya sumbangan Islam yang bisa diberikan kepada negara. Sejak itu pula posisi politik Islam mengalami kelumpuhan total.

Kelumpuhan politik ini diperparah oleh perpecahan politik umat Islam. Keluarnya PSII dan NU dari Masyumi semakin melemahkan Masyumi sebagai kekuatan politik Islam. Sejak 1952 NU mengubah dirinya dari jam'iyah organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik. Kebesaran NU ini dibuktikan pada Pemilu 1955, dimana NU muncul sebagai partai terbesar ketiga sesudah PNI dan Masyumi dengan meraih 18,4% dari seluruh jumlah suara peserta Pemilu, dan NU memperoleh 45 kursi parlemen (Al-Chaedar, 1998).

Perpecahan politik Islam tetap tidak mengubah orientasi perjuangan sebagian umat untuk terus memperjuangkan gagasan negara Islam. Dalam berbagai sidang Dewan Konstituante, khususnya Masyumi tetap menyuarakan ide-ide negara Islam. Sementara itu masa demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet, telah mendorong Presiden Soekarno untuk membubarkan Konstituante. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dewan Konstituante dibubarkan dan Presiden mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan dekrit itu, otomatis persoalan Piagam Jakarta terungkit kembali.

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul "Penentuan Kembali Revolusi Kita" menjelaskan butir-butir pokok Demokrasi Terpimpin, yang diawali dengan 12 definisi demokrasi dan salah satunya bahwa demokrasi terpimpin adalah "demokrasi yang dikatakan dalam UUD 1945 sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dengan demikian Soekarno mencari pembenaran sistem dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pada kesempatan lain dijelaskan, demokrasi terpimpin adalah "demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki, liberalisme, tanpa otokrasi diktator". Demokrasi

kekeluargaan yang dimaksudkan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan atau kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh atau seorang tetua yang tidak mendiktatori tetapi memimpin dan mengayomi (Soekarno, 1964).

Siapa yang dimaksud dengan seorang "tetua" dan "sesepuh" tidak lain dari dirinya sendiri sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai seorang ayah yang "serba bijak", sudah tentu tidak akan berbahaya sekiranya kekuasaan di republik ini berpusat di tangan Soekarno, karena tidak akan mendiktatori. Setidak-tidaknya begitulah teori yang dilemparkan ke bursa politik Indonesia.

Kenyataan menunjukkan bahwa Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin yang merupakan antitesis terhadap pelaksanaan demokrasi liberal, Indonesia memasuki masa dimana peranan demokrasi telah dimanipulasi oleh prinsip-prinsip kediktatoran, merupakan se bentuk pemerintahan otokratis yang menumpas setiap pandangan yang berseberangan dan oposisi. Lebih dari itu, pada tahun 1962 Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup.

Kebijaksanaan lain Soekarno yang dinilai sangat merugikan umat Islam adalah keputusannya membubarkan Masyumi yang pernah bekerja sama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk membuat demokrasi tandingan yang diberi nama Liga Demokrasi, karena keterlibatan sebagian pimpinan dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Dengan dibubarkannya Masyumi pada bulan Agustus 1960 itu, NU yang telah menjadi partai politik dan keluar dari Masyumi, tampil sebagai wakil politik Islam.

Sepeninggal Masyumi, politik Islam yang berlangsung adalah politik penyesuaian diri. Di antara partai-partai Islam di Indonesia, tiga partai yaitu NU, PSII dan Perti bertahan hidup selama demokrasi terpimpin. Keberhasilan partai-partai tersebut untuk bertahan, karena mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi terpimpin yang dikehendaki Presiden Soekarno. Akibatnya, MANIPOL USDEK disetujui, bahkan Bung Karno diberi gelar oleh Perti dan NU sebagai "*waliy al-amri dharury bial-syaukah*". Hal ini merupakan cermin oportunistik Islam dalam politik. Ironisnya partai-partai Islam tersebut tidak memperdulikan para tahanan politik tokoh Muslim yang dipenjarakan Soekarno, sekalipun dari NU seperti Imron Rosyadi (Al-Chaedar, 1998).

Potret oportunistik Islam lebih transparan pada kasus pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS pada tanggal 18 Mei 1963. Meskipun hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, tetapi partai-partai Islam di bawah pimpinan NU dengan juru bicara Achmad Syaichu bukan saja menyetujui penetapan itu, melainkan juga mencarikan dalil agama untuk menguatkannya.

Menurut Syafii Maarif (1993) setidaknya ada tiga pertimbangan pokok yang dikemukakan oleh kelompok Islam dalam MPRS untuk menyokong penetapan tersebut, yaitu :

1. *Pertimbangan politik.* Syaichu mengungkapkan betapa luar biasanya jasa-jasa Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan yang dimulai dari 1920-an. Kemudian berkat kepemimpinan Soekarno Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Berdasarkan prestasi politik itu semua pantaslah untuk memberikan kehormatan tertinggi kepadanya.
2. *Pertimbangan revolusioner.* Syaichu membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin revolusi di Saudi Arabia 14 abad yang lewat. Dengan membuat perbandingan tersebut umat Islam wajib mentaati ketetapan MPRS sekalipun tidak selaras dengan UUD 1945.
3. *Pertimbangan agama.* Dalam menjelaskan hal tersebut dikatakan bahwa sepanjang sejarah Islam tidak pernah didapati adanya kepala negara yang dibatasi masa jabatannya baik selama 5 tahun maupun 10 tahun. Hal ini berarti bahwa seorang kepala negara tetap sah memimpin dan menduduki jabatannya seumur hidup selama masih memenuhi persyaratannya.

Serangkaian kekalahan politik yang dialami umat Islam dengan kekuatan lain, telah menyadarkan umat Islam untuk mencari paradigma baru dalam keterlibatannya membangun kehidupan bangsa yang sehat lahir batin. Dengan format baru, seharusnya agama dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia, mampu tampil sebagai pembela keadilan, demokrasi, kecerdasan, dan martabat bangsa secara sungguh-sungguh.

MASA ORDE BARU

Pengalaman adalah guru yang berharga merupakan salah satu statemen yang dipegang penguasa Orde Baru setelah mendapatkan amanah rakyat. Kekuasaan Orde Lama selama 20 tahun belum mampu mengantarkan bangsa Indonesia menikmati hasil-hasil kemerdekaan secara berarti. Bahkan tanpa menafikan jasa orde lama, kekuasaannya telah mewariskan konflik ideologi, kebobrokan ekonomi, dan tragedi nasional pemberontakan G 30 S PKI yang hendak mengubah Pancasila dan agama dengan ideologi komunisme.

Pada masa awal Orde Baru, partai-partai Islam banyak mengambil kesempatan dari jatuhnya PKI. Sementara itu ABRI memiliki sikap hati-hati sehingga mengesankan curiga terhadap umat Islam. Hal ini setidaknya terlihat dari sikap ABRI yang tidak mau merehabilitasi bekas partai politik Masyumi, maupun mencurigai usaha para bekas anggota Masyumi yang mendirikan Parmusi. Partai politik Islam ditekan untuk berorientasi pada program dan meninggalkan orientasi pada ideologi.

Rakyat yang sebelumnya telah memiliki gairah berpolitik, akhirnya hanya dapat menghela nafas panjang ketika kebijakan-kebijakan Orde Baru yang muncul satu-persatu hanya menghasilkan pengekan politik.

Pada awal Orde Baru, umat Islam semakin marjinal (tersisih) dan kurang mampu berbuat banyak. Proses marjinalisasi umat Islam berjalan terus, bahkan kemudian umat Islam dituduh sebagai tidak siap untuk terlibat dalam proses modernisasi, karena dianggap tidak memiliki tradisi intelektual sebagaimana yang dimiliki kalangan Kristen dan Nasionalis sekuler yang mayoritas berpendidikan Barat, bahkan karena umat Islam menempati posisi marjinal dalam proses pembangunan nasional, sering dianggap sebagai anti pembangunan dan anti modernisasi.

Hubungan antara pemimpin politik Islam dengan pemerintah Orde Baru menjadi semakin buruk ketika muncul isu "Kristenisasi" dalam panggung politik nasional, namun setelah sepuluh tahun usia Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap umat Islam mulai menunjukkan perubahan, angin segar mulai berhembus untuk mendekati umat Islam.

Dengan alasan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, keamanan dan keharmonisan kehidupan umat beragama, pemerintah pada tahun 1967 mulai menutup lembaga missionaris dan zending. Dua tahun kemudian Departemen Agama RI mengeluarkan peraturan yang mengatur bantuan-bantuan asing untuk lembaga keagamaan. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan larangan kegiatan mempengaruhi kelompok masyarakat yang sudah memeluk suatu agama tertentu untuk diajak masuk agama lain. Begitu pula kesediaan pemerintah untuk menarik kembali rancangan undang-undang perkawinan pada tahun 1973 yang sulit diterima umat Islam karena dinilai bertentangan dengan syariat Islam, serta penolakan pemerintah pada tahun 1970-an atas tuntutan "kalangan abangan" agar kepercayaannya diakui sebagai salah satu agama resmi oleh pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang cukup menggembirakan umat Islam (Al-Chaedar, 1998).

Aspirasi umat Islam pasca fusi disalurkan melalui PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Meskipun partai-partai Islam telah mengalami fusi pada tahun 1973, friksi internal senantiasa membayangi keutuhan PPP sehingga tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan umat. Komposisi kepengurusan dan daftar calon anggota legislatif sering menjadi pemicu konflik internal tersebut.

Meskipun Golkar bukan merupakan partai Islam, tetapi semakin mendekati masa berakhirnya Orde Baru, semakin menunjukkan kedekatannya dengan Islam. Berbekal dana yang besar serta fasilitas yang memadahi mampu merangkul berbagai kalangan tidak terkecuali pesantren dan majelis-majelis taklim besar serta para tokoh ormas Islam.

Jargon "Islam Yes, Partai Islam No" yang dilontarkan Nurcholish Madjid pada tahun 1970-an memiliki pengaruh signifikan bagi pilihan umat Islam yang berserak di

ketiga partai. Akibatnya Golkar dan PDI diuntungkan dan PPP merasa dirugikan. PPP yang merupakan "pewaris" partai-partai Islam telah dirugikan lantaran banyaknya umat Islam yang lebih memilih partai "sekuler", sehingga meskipun umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, PPP sebagai "partai Islam" tidak pernah memiliki suara mayoritas di parlemen.

Dalam tubuh PDI yang nyata-nyata tampil sebagai wadah nasionalis demokrat sekuler juga terdapat beberapa patron Islam yang diharapkan dapat menyedot sebagian umat Islam, tidak saja abangan tetapi juga santri. Itulah sebabnya di kalangan pengurus juga dipasang tokoh yang bertitel "KH", bahkan mendirikan jamaah pengajian rutin, sebagai upaya merangkul berbagai kalangan Islam, bahkan kalangan pesantren.

POSISI UMAT ISLAM DI ERA REFORMASI

Ketika Presiden Soeharto membacakan "surat pengunduran diri" pada tanggal 21 Mei 1998, berakhirlah era yang dinamakan Orde Baru. Umat Islam kembali menaruh harapan mendapat keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Habibie yang dikenal memiliki tingkat kecerdasan "di atas rata-rata" orang Indonesia diharapkan dapat berbuat banyak untuk mengentaskan Indonesia dari krisis multi dimensi, ternyata legitimasinya "terganggu" oleh kedekatannya dengan Soeharto di masa lalu, sehingga tidak mendapat "peluang" yang memadai untuk berbuat banyak, tetapi dalam waktu yang relatif singkat tersebut telah mampu membuat "cair" situasi politik dan membebaskan pers dari belenggu keterkungkungan. Hal ini merupakan prestasi Habibie, yang juga dikenal sebagai lokomotif ICMi wadah para cendekiawan muslim yang tersebar di beberapa sektor kehidupan bangsa.

Pemilu di era Habibie mengingatkan pada pemilu di jaman multi partai. Umat Islam memiliki banyak pilihan partai yang bernafaskan Islam, mulai dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, Partai Sarikat Islam Indonesia, Partai Nahdatul Ulama, Partai Persatuan, Partai Daulat Umat, Partai Masyumi, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Di samping itu, beberapa partai lain yang meskipun tidak bernafaskan Islam tetapi menawarkan program yang diperkirakan dapat menarik hati umat Islam, karena menyadari bahwa mayoritas bangsa ini menganut agama Islam.

Mencermati perolehan kursi umat Islam dalam friksi-friksi DPR RI yang merupakan hasil Pemilu terakhir sebenarnya kurang menggembirakan karena partai-partai Islam tidak memperoleh kursi yang signifikan. FPP hanya memperoleh 58 kursi, FKB 51 kursi, FBB 13 kursi, padahal FP-PDIP memperoleh 154 kursi, FPG 120 kursi. Kenyataan tersebut disamping membuktikan bahwa umat Islam yang merupakan mayoritas masih berserak-serak di kantung-kantung "lain" juga terlihat belum mampu mempercayai sepenuhnya para elite umat dan pemimpin partai-partai Islam.

Namun demikian, Sidang Umum MPR hasil Pemilu di era Habibie berakhir dengan terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR RI, Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR RI dan KH. Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI. Seusai sidang, di dalam dan di luar gedung diwarnai suasana bersyukur umat Islam yang dimanifestasikan dengan pembacaan Shalawat Badar serentak. Kegembiraan perasaan umat Islam tersebut barangkali karena melihat para pemimpin tertinggi bangsa Indonesia adalah para santri dan bukan abangan, karena melalui media massa diketahui bahwa Amien Rais adalah mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikenal rajin shalat malam dan puasa Senin-Kamis bahkan puasa Daud. Akbar Tanjung adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI yang sangat berpengalaman memimpin organisasi dan memiliki ketenangan penampilan dalam menghadapi masalah sekrusial apapun, serta KH. Abdurahman Wahid adalah seorang Kyai dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama. Tampilnya Amien Rais dan KH. Abdurahman Wahid melegakan umat Islam yang telah lama merindukan suasana "bulan madunya"nya NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di negeri ini.

Baru beberapa minggu merasakan dipimpin oleh "tiga santri", mulai muncul lontaran kekecewaan terhadap salah satu atau ketiganya. Kekecewaan tersebut pada mulanya disebabkan oleh persoalan sekunder, yakni menyangkut sikap dan perilaku yang dipertontonkan baik oleh kalangan eksekutif maupun legislatif, yang terkesan seolah lupa bahwa mereka merupakan pimpinan tertinggi dari lembaga tinggi dan tertinggi negara. Sikap dan perilaku mereka tetap mirip dengan sikap dan perilaku semasa menjadi orang LSM, bahkan terkadang dinilai kalangan tertentu bahwa sikap dan perilaku mereka terlihat cenderung "kekanak-kanakan", dan tidak jarang dinilai kurang "Islami".

Kesibukan masing-masing elit yang seolah berjalan sendiri-sendiri, membuat seolah lupa terhadap agenda reformasi. Korupsi tetap marak, kolusi ada dimana-mana, dan nepotisme masih subur bahkan di seputar para elit. Nilai rupiah tetap terpuruk, kerusuhan bernuansa SARA datang silih berganti, investor ragu menanamkan modal, pertumbuhan ekonomi kurang menggembirakan, angka pengangguran meningkat, konflik vertikal dan horisontal sulit dikendalikan, bahkan masing-masing komunitas pendukung elit tertentu saling menghujat elit komunitas lain, dengan diikuti pujian dan pembelaan terhadap elit pujaan masing-masing.

Puncak krisis kepercayaan terhadap Presiden ditandai dengan lahirnya Memorandum DPR setelah mengamini hasil Pansus Bulog Gate dan Brunei Gate yang mengindikasikan keterlibatan Presiden, kemudian disusul "balasan" peristiwa pemblokiran jalan dengan penebangan pohon di Situbondo, penghadangan Amien Rais yang sedang menuju ke Malang, pendudukan pelabuhan penyeberangan Gilimanuk di Banyuwangi, perusakan kantor dan sekolah Muhammadiyah serta pembakaran kantor DPD Golkar di Jawa Timur.

Memorandum tersebut sebenarnya masih bersifat discussable dan belum final karena terlihat lebih bermuatan politis daripada yuridis, sehingga dibutuhkan kearifan semua pihak untuk lebih dapat menahan diri dalam mencermati persoalan tersebut. Kedua belah pihak, baik yang pro maupun kontra memorandum memiliki sejumlah data yang sama kuat dan akuratnya. Pada kedua belah pihak juga terdapat sejumlah tokoh umat Islam, yang seharusnya dapat duduk berunding mencari solusi terbaik sambil menunjukkan tingkat "ketokohan" mereka daripada bersikap merasa paling benar sendiri tanpa klarifikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya, dan sikap tersebut akan diikuti oleh jajaran umat di bawah serta ditindaklanjuti dengan tindakan yang justru merugikan citra Islam dan umat Islam sendiri.

IHTITAM

Umat Islam Indonesia diharapkan istiqamah dalam bingkai *ummatan wahidah*, agar tidak terpolarisasi dalam segmentasi ideologi, sehingga dapat diwujudkan konsep kehidupan sosial yang ideal selaras dengan tuntunan wahyu. Sejarah membuktikan bahwa berseraknya umat Islam dalam pelbagai "sekte" tidak pernah menguntungkan. Pada tahun 1955, umat Islam memperoleh 116 dari 257 kursi yang diperebutkan. Perolehan suara terus melorot, sehingga dalam Pemilu 1977 hanya kebagian 94 kursi dari 360 kursi yang tersedia. Demikian pula halnya dalam Pemilu 1977 ketika umat Islam resminya berafiliasi dalam PPP hanya mendapat 29,2%, dan sebagian lainnya terbagi dalam tubuh Golkar dan PDI. Era Reformasi dengan munculnya banyak partai Islam, maka suara umat Islam semakin tidak signifikan. Persoalannya sekarang berada di tangan umat Islam sendiri bersama para pemimpin Islam.

Berlarut-larutnya persoalan umat dan bangsa serta carut-marutnya keadaan negara tidak dapat dibiarkan berlangsung terlalu lama, agar kredibilitas umat Islam dapat diperhitungkan. Sampai hari ini roda-roda kekuasaan masih berputar, otoritas dan legitimasi masih berada di tangan ketiga santri tersebut di atas, sehingga masih memiliki peluang emas untuk mengukir sejarah bangsa dengan mengentaskan nasib bangsa ini dari keadaan yang paling mengenaskan. Kesuksesan mereka adalah kesuksesan umat Islam Indonesia dan kegagalan mereka akan menurunkan kredibilitas umat Islam dalam pandangan bangsa Indonesia bahkan dunia. Akan tetapi sekali lagi mereka masih mempunyai waktu yang cukup untuk mengubah jalannya sejarah bangsa. Mudah-mudahan Allah berkenan menolong bangsa Indonesia keluar dari kemelut. Semoga. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, 1997. *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta : LP3ES.

- Al-Chaedar, 1998. Reformasi Prematur : Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, Jakarta : Darul Fatah
- Anshari, M. Isa, 1951. Filsafat Perjuangan Islam, Medan : Saiful.
- Azra, Azumardi, 1966. Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme, Jakarta : Paradina.
- Benda, HJ, 1980. Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Bolland, BJ, 1985. Pergumulan Islam di Indonesia, Jakarta : Grafiti Pers.
- Esposito L. John, 1985. Islam and Development Religion and Socio Cultural Change, (terj.) Wardah Hafidz, Yogyakarta : PLP2M.
- , 1987. Voices of Resurgent Islam, (terj.) Bakri Siregar, Jakarta : Rajawali Press.
- Fachri Ali, 1985. Islam : Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural, Bandung : Mizan.
- Fazlurrahman, 1983. Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago & London : The University of Chicago.
- Ibnu Taimiyah, 1966. Al-Siyasah al-Syari'ah, Beirut : Dar Kitab Al-Arabiyyah.
- Maarif, Ahmad Syafii, 1993. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung : Mizan.
- , 1966. Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Jakarta : Gema Insani Press.
- , 1999. Islam dan Politik : Upaya Membingkai Peradaban, Cirebon : Pustaka Dinamika.
- Soekamo, 1964. Di bawah Bendera Revolusi, Jakarta : Panitia Penerbitan.
- Suadi Putro, Mohammad Arkoun : Islam dan Modernitas, Jakarta : Paradina.
- Tobroni dan Syamsul, 1966. Islam Pluralisme Budaya dan Politik : Refleksi Teologi Untuk Aksi Dalam Keberagaman dan Pendidikan, Yogyakarta : Sipress.
- Zaidan, Abdul Karim, 1970. Al-Fard wa al-Daulah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, al-Ittijhad al-Islami al, al-Alami.